

Paripurna DPR Setujui Pansus Haji

JAKARTA (KR) - Rapat Paripurna DPR RI ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024.

"Saya kira karena Pak Lodewijk sudah mengatakan buat Pansus ya, kami menyetujui untuk dibuat Pansus," kata Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel seraya mengetuk palu tanda persetujuan di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/7).

Persetujuan itu diambil setelah dua anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI yakni MF Nurhuda Yusro dan John Kennedy Azis mengemukakan interupsi terkait sejumlah temuan permasalahan selama pelaksanaan ibadah haji 2024.

John Kenedy Azis mengatakan, keputusan pembentukan Pansus Haji sedianya telah disepakati oleh Timwas Haji DPR di Makkah,

Arab Saudi, pada 12 Juni lalu. "Dan ini juga sudah pada rapat kami pada tanggal 12 Juni yang lalu di Arab Saudi yang ketika itu juga dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Bapak Lodewijk (Lodewijk F Paulus) kami bersepakat untuk membuat Pansus untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tentang haji ini," ucap Azis.

Selain mengemukakan soal masalah antrean panjang calon jemaah haji Indonesia, ia membeberkan sejumlah temuan permasalahan lainnya, yakni kelebihan muatan tenda jemaah haji Indonesia, hingga persoalan transportasi dan makanan selama di Arab Saudi. "Itu adalah suatu permasalahan yang tahun ke tahun tanpa ada penyelesaiannya oleh Pemerintah," ujanya.

MF Nurhuda Yusro juga menyampaikan sejumlah temuan Timwas Haji DPR saat melakukan pemantauan pelaksanaan ibadah haji 2024 ke Arab Saudi. Di antaranya, per-

soalan keterlambatan transportasi jemaah haji Indonesia, fasilitas penginapan, kelebihan muatan tenda, kondisi kelayakan konsumsi jemaah, hingga ketersediaan layanan kesehatan.

Ia menyebut persoalan-persoalan tersebut menjadi temuan yang kerap dijumpai dari tahun ke tahun oleh Timwas Haji DPR sehingga mengganggu kekhusyukan jemaah haji Indonesia dalam menjalankan ibadah selama di Tanah Suci.

"Namun, berbagai rekomendasi temuan Tim Pengawas Haji tidak selalu menjadi bahan perbaikan kemudian hari, masalahnya selalu berulang dan dalam hal pelayanan, transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, dan pelayanan lainnya. Maka kami dari beberapa Anggota DPR telah mengusulkan dibentuknya Panitia Khusus Penyelenggaraan Ibadah Haji," tutumya.



KR-Antara/Aloysius Jarot Nugroho

FESTIVAL IKM 2024: Pelaku industri kecil menengah (IKM) menata hasil kerajinan batik kayu pada Klaten Gumregah Festival IKM 2024 di Alun-alun Klaten, Jawa Tengah, Kamis (4/7/2024). Klaten Gumregah Festival IKM 2024 yang digelar Pemerintah Kabupaten Klaten itu diikuti 80 pelaku IKM yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

BRIN. **Sambungan hal 1**

adalah bukti tertua yang bisa diketahui dari sudut pandang arkeologi," ujanya.

Oktaviana menerangkan, temuan ini telah dipublikasi di jurnal sains terkemuka, Nature, karena menggunakan metode termutakhir dalam penemuannya, yakni melalui ablasi laser U-series (LA-U-series) yang berada di Griffith University dan Southern Cross University untuk menda-

patkan penanggalan akurat pada lapisan tipis kalsium karbonat yang terbentuk di atas seni hias tersebut.

Ia menekankan, penelitian atas lukisan goa atau gambar cadas penting untuk dilakukan, karena penelitian atas gambar cadas membantu penelitian soal peradaban dan migrasi manusia purba, dimana penelitian dengan metode ekskavasi atau

penggalian membutuhkan teknologi canggih dan biaya yang tidak sedikit.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengapresiasi para peneliti atas temuannya tersebut. Ia menilai hal ini merupakan implementasi tanggung jawab arkeolog bangsa dalam menemukan peninggalan sejarah nenek moyang masyarakat Indonesia.

Kasus **Sambungan hal 1**

keluar, KPU wajib melakukan penunjukan Plt KPU RI sekitar 1x24 jam usai pembacaan putusan DKPP.

"Putusan DKPP sudah dibacakan kemarin dan mekanisme organisasi kita dalam hal ada putusan DKPP dan berhalangan tetap dengan klausul-klausul yang jelas, kami harus melakukan penunjukan Plt dalam waktu 1x24 jam," terang Aff.

Selain itu, KPU juga sudah mematuhi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

"Kalau kita lihat situasi pembacaan putusan DKPP kemarin sekitar jam 2 sampai 3 sore, kami menganggap sekarang mendekati 24 jam. Belum 24 jam dan kami sudah mematuhi aturan PKPU 5 Tahun 2022," tutumya.

Wapres Ma'ruf Amin menilai putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjadi pelajaran penting untuk memegang moralitas dan

integritas.

Usai menghadiri pembukaan Asian Pacific Aquaculture 2024 di Surabaya, kemarin, Wapres menilai, penetapan tersangka terhadap Hasyim Asy'ari menjadi pelajaran penting untuk semua pihak, terutama yang memegang kekuasaan agar tidak terjadi kembali tindakan tidak bermoral tersebut di lembaga lain.

"Jangan main-main, nanti seperti apa yang terjadi di KPU berarti kalau ada yang lain pasti akan terjadi lagi. Oleh karena itu, ini buat saya ini menjadi pelajaran penting untuk pemegang moralitas kemudian juga integritas," tegas Wapres.

Dalam menanggapi putusan DKPP itu, Wapres menghormati segala keputusan dan kewenangan DKPP untuk memberhentikan Hasyim dari jabatannya sebagai Ketua KPU. Wapres mengakui kasus yang menimpa Hasyim telah mencoreng KPU. Namun, ia meminta kesalahan yang dilakukan Hasyim merupakan perseorangan.

Ia berharap KPU tetap menjalankan tugasnya dengan baik sebagai satu tim, meskipun satu orang dalam hal ini Ketua KPU tersandung kasus dugaan asusila.

KPU. **Sambungan hal 1**

pemberhentian Ketua KPU Hasyim Asy'ari oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sesuai jadwal KPU, pilkada akan tetap diselenggarakan secara serentak pada 27 November 2024, karena sudah ada mekanisme pemberhentian antar-waktu untuk mengisi kekosongan anggota KPU. "Pemerintah memastikan, pilkada dapat berjalan dengan baik, lancar, jujur dan adil," kata Presiden Jokowi di sela-sela kunjungan kerja di Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan, ke-

marin.

Lebih lanjut, Presiden menyatakan menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan memberhentikan Hasyim Asy'ari terkait kasus asusila. Ia pun mengatakan segera memroses surat Keputusan Presiden (Keppres) guna menindaklanjuti putusan DKPP tersebut. "Keppres belum masuk ke meja saya. (Masih) dalam proses, proses administrasi. Biasa saja," ucap Presiden.

DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Hasyim Asy'ari selaku Ketua

merangkap anggota KPU, karena kasus dugaan asusila terhadap anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag Belanda, bernisial CAT.

Putusan itu dibacakan dalam sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik di Kantor DKPP RI, Jakarta, Rabu (3/7). DKPP mengabulkan pengaduan pengadu seluruhnya dan meminta Presiden RI Joko Widodo untuk mengganti Hasyim dalam kurun waktu tujuh hari sejak putusan dibacakan.

(Ant/Obi)-f

Dirjen **Sambungan hal 1**

secara teknis adalah tanggung jawabnya. "Saya mengambil tanggung jawab ini secara moral dan saya menyatakan harusnya selesai di saya. Karena ini adalah masalah yang harusnya saya tangani dengan baik," tandasnya.

Sementara itu menanggapi desakan sejumlah pihak agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mundur pascaserangan siber terhadap PDNS 2 Surabaya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, menteri merupakan orang yang membantu presiden. "Jadi, ya selama dalam menjalankan tugasnya tidak bisa maksimal, ya mungkin bisa dievaluasi oleh Presiden," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menyampaikan jawaban atas desakan sejumlah pihak yang meminta Budi Arie Setiadi mundur dari jabatan Menkominfo. "Semuanya sudah dievaluasi,"

kata Presiden usai meresmikan ekosistem baterai dan kendaraan listrik Korea Selatan di Karawang.

Desakan agar Budi Arie Setiadi mundur dari jabatan Menkominfo, salah satunya disuarakan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) dengan menggalang petisi via laman change.org yang dibuka sejak 26 Juni 2024. Petisi bertajuk 'PDNS Kena Ransomware, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi Harus Mundur!' itu telah ditandatangani lebih dari 23.621 warganet.

Sementara itu Samuel menambahkan, meskipun ia mengundurkan diri dari Dirjen Aptika Kemenkominfo, proses pemulihan PDNS 2 masih terus dilakukan secara optimal. Samuel telah menjabat sebagai Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo sejak 2016 hingga 2024 ini. Dalam dunia industri telekomunikasi namanya dikenal sebagai pimpinan di berbagai organisasi nasional

dan internasional.

Beberapa jabatan yang pernah diembannya antara lain sebagai Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2012-2015, Head of Delegation ASEAN Telecommunications and IT Minister Meeting (TELMIN) 2018-2019. Samuel juga pernah menjabat Chairman ASEAN Telecommunications and Information Technology Senior Officials Meeting (TELSOM) 2018-2019.

Keputusan untuk melangkah mundur sebagai Dirjen Aptika diambil Samuel, salah satunya dipengaruhi insiden serangan siber ransomware Brain Cipher pada PDNS 2 di Surabaya. Serangan siber itu melumpuhkan banyak layanan publik dan yang paling berdampak layanan keimigrasian pada Kamis (20/6). Secara berangsur layanan publik mulai pulih setelah serangan siber itu ditemukenalai Pemerintah lewat berbagai kolaborasi antarlembaga terkait.

Produser **Sambungan hal 1**

bawaan penumpang tujuan India," ujanya.

Barang bukti satu ekor burung cenderawasih kuning kecil (Paradisaea minor), satu ekor burung cenderawasih botak papua (Cicinnurus republica), dan satu ekor berang-berang cakar kecil albino (Aonyx cinereus) selanjutnya ditiptrawatkan ke BKSDA Jakarta.

Diungkapkan, kronologis penggalangan aksi penyelundupan ini bermula pada Senin (1/7) lalu dengan adanya kecurigaan terhadap hasil citra X-Ray sebuah koper penumpang warga negara asing (WNA) dengan bagasi pesawat Indigo Air nomor penerbangan (6E 1602) tujuan Mumbai, India.

Atas kecurigaan tersebut petugas melakukan penindakan terhadap koper dan memanggil penumpang yang sudah berada di Boarding Room untuk diperiksa barang bawaannya. "Satwa langka itu disembunyikan pada koper yang disamarkan dengan

yang dibawanya merupakan titipan kenalannya yang juga WNA India di Terminal 2 Bandara Soeta untuk diberikan kepada seseorang.

Atas penemuan kasus tersebut, pihaknya menaikkan status ke tahap penyidikan dan menetapkan pelaku RM sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran tindak pidana kepabeanaan Pasal 102A UU No 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan dengan ancaman hukuman pidana maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar.

Festival **Sambungan hal 1**

sampah) sudah tidak seimbang lagi. Sungguhpun Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, telah melakukan sosialisasi, hingga pembentukan forum bank sampah tingkat kelurahan hingga kota. Bagaimana hasilnya?

Bagaimana langkah strategis dan integratif untuk menyelesaikan masalah sampah? Penyadaran mendasar melalui edukasi kepada masyarakat sejak dini perlu dilakukan. Pendidikan formal dalam hal ini, memiliki tanggung jawab memberikan pelajaran kedisiplinan, ketertiban, dan kebersihan yang terintegrasi dalam sebuah kurikulum. Sektor inilah yang menjadi investasi generasi muda tentang pentingnya kesadaran lingkungan yang bersih. Dengan demikian permasalahan sampah tidak hanya 'dibicarakan' dengan gagasan yang tidak rasional, spontan, bahkan improvisasi untuk kepentingan 'sesaat'.

Untuk mencapai misi tersebut, perlunya membangun relasi pada diri, sesama, dan lingkungan dari yang sifatnya horizontal maupun vertikal harus diwujudkan. Ini adalah maklumat makna sastra profetik, yang di dalamnya terdapat pemahaman amar ma'ruf nahi munkar.

Dalam tinjauan ekonomi sirkuler, sampah menjadi barang bekas dan tidak bermanfaat

lagi. Dalam konteks ini manusia 'pembuat sampah' harus bertanggung jawab. Menyadarkan masyarakat Jogja untuk bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan sebagai kesadaran ekokritik terhadap lingkungan sekitar (Suminto A. Sayuti).

Penyadaran tentang sampah melalui pemahaman tembang Jawa adalah edukasi yang luar biasa. Kita ingat lirik tembang Subakastawa Ki Narto Sabdo terdapat penggalan kata-kata sebagai berikut: ... e lha inda temen megane, putih memplak payunge. Pada bagian lain ada kata-kata "per pleper manuke mabur"....."Per pleper manuke mabur itu bermakna sindiran untuk manusia, yang kadang ada manusia yang meninggalkan atau membuang sampah, pergi tanpa bertanggung jawab seperti halnya burung liar. Inilah edukasi yang harus kita sampaikan melalui pembelajaran seni, agar sampah-sampah tidak 'menar' ke mana-mana.

Silang sengkabut masalah sampah di Kota Yogyakarta dan sekitarnya perlu satu pemecahan yang terpadu dan kontekstual dengan prinsip sawiji greget, sungguh dan ora mingkuh. Itu semua dapat diwujudkan melalui Festival 'Sampah'. Dalam kegiatan ini semua lapisan masyarakat akan fokus memanfaatkan sampah untuk tampil dalam sebuah

festival. Mereka akan hadir dengan kreasinya masing-masing agar menghasilkan produk estetik. Dengan festival ini sentuhan estetik akan dimunculkan sebagai wujud pertanggungjawaban manusia atas sampah yang telah dilahirkan di rumah maupun di lingkungan masing-masing.

Contoh di Festival Sendratari se-DIY (2016) muncul kreasi kostum tari dengan bahan limbah sampah. Bahkan di tahun 1998, mendiang Martinus Miroto (koreografer) pernah membuat karya tari 'Kembang Sampah'. Ketika itu kegelisahan seniman tari ini terkait kondisi sekitar sungai yang penuh dengan buangan sampah. Kritik sosial melalui karya tari itu mendapat respons positif dari pemerintah daerah.

Dengan festival sampah kita bisa mengedukasi masyarakat, tidak hanya melalui pertunjukan, pameran karya dengan bahan baku sampah, namun semua produk yang mampu menghadirkan sampah estetik. Gerakan ini menghadirkan produk kreatif dan unik. Realitas di pasar, masyarakat Eropa tertarik dengan produk-produk unik tersebut. Ini artinya produk sampah estetik bisa menjadi komoditas ekonomi.

(Penulis adalah Guru Besar FBSB UNY/ Pengamat Budaya)-d

Prakiraan Cuaca

Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul					22-30	65-95
Sleman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95

Cerah Berawan Udara Kabin Hujan Lokal Hujan Lebar

Oraris : Arko

Jumat, 5 Juli 2024



Krisnawati
Dosen Prodi Sistem Informasi
Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Amikom Yogyakarta

SAAT ini kita sedang berada di era digital. Era digital ditandai dengan semakin berkembangnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam setiap aktifitas baik individu maupun publik. Aktifitas tersebut pasti memerlukan data yang

Ketahanan Data, Kedaulatan Data dan Kedaulatan Bangsa

nantinya akan dikelola dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Data adalah sekumpulan data/fakta yang dimiliki oleh obyek tertentu. Agar mempunyai makna, data akan diolah menjadi informasi. Informasi inilah yang dapat menjadi dasar terhadap kebijakan/kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu. Betapa pentingnya data sehingga setiap organisasi bahkan orang pribadi sangat menjaga agar data tersebut hanya dapat diakses oleh organisasi atau orang yang mempunyai hak saja.

Belakangan ini sedang marak pemberitaan mengenai data institusi/pemerintah yang diretas oleh pihak lain. Konon

kabarnya data-data ini bersifat rahasia, sehingga tidak seharusnya diinformasikan ke khalayak. Sampai dengan tahun 2024 ini ada beberapa isu peretasan data, mulai dari data pelanggan layanan pemerintah, data pengguna simcard, data pelamar kerja, data pasien rumah sakit bahkan data milik perbankan. Terakhir adalah berita mengenai diretasnya Pusat Data Nasional (PDN) yang mengakibatkan layanan di sejumlah instansi pemerintahan terganggu. Terganggunya layanan publik ini tentu akan mengakibatkan terhabatnya kegiatan-kegiatan yang memerlukan hasil dari layanan publik tersebut.

Ketahanan data merupakan suatu kemampuan organisasi

untuk memulihkan diri dari pelanggaran data dan jenis kehilangan data lainnya, segera memberlakukan keputusan untuk merencanakan keberlangsungan bisnis, segera melakukan pemulihan aset yang hilang, dan segera memaksimalkan perlindungan data milik organisasi tersebut di masa mendatang. Peretasan terhadap data dalam suatu sistem tidak hanya mengakibatkan kepada terganggunya layanan yang diberikan sistem tersebut, namun bisa juga berakibat kepada digunakannya data tersebut untuk kepentingan tertentu. Bukannya data hanya sekumpulan fakta yang belum mempunyai arti? Betul, namun jika domain data tersebut sudah diketahui dengan jelas maka

dapat dengan mudah dilakukan analisis terhadap data yang dimaksud untuk kepentingan tertentu sesuai dengan domainnya.

Hakikat dari kedaulatan data merujuk pada konsep bahwa data yang dihasilkan, disimpan, dan diproses oleh suatu entitas (baik individu, organisasi, maupun negara) harus dikendalikan dan dikelola sesuai dengan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di wilayah tersebut. Peretasan data mengakibatkan organisasi tidak bisa lagi mengendalikan data untuk keberlangsungan layanan akibatnya kedaulatan data sudah tidak lagi dimiliki oleh organisasi. Analogi tersebut tentu dimungkinkan terjadi pada suatu bangsa. Jika negara tidak



bisa lagi mengendalikan data yang sudah dihimpun dari rakyat, maka di saat itulah kedaulatan bangsa dan negara mulai terancam. Pemulihan harus segera dilakukan untuk menjaga keberlangsungan bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Ini juga dapat menjadi pembelajaran bagi orang pribadi untuk mengamankan data agar kita menjadi pribadi merdeka dan berdaulat. Amankan datamu, amankan data kita, serta amankan data bangsa dan negara.